



# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	54
<b>BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>55</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3 Program dan Kegiatan .....	58
<b>BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>62</b>
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi.....	62
4.2 Prioritas Perangkat Daerah.....	62
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	82
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018 .....	6
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	29
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur .....	31
Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	57
Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah .....	63

# **BAB 1    PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**

## **BAB 2      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 2 2	Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Waktu Pelayanan Perkantoran dengan Ketersediaan Operasional yang Memadai Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah paket peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran jumlah paket sarana perkantoran yang diadakan	100   12 100 3 4	100   12 100 4 4	100   12 100 3 4	100   12 100 3 4	100   100 75 100 100	100   12 100 3 4	100   12 100 3 4	100   100 75 100 100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana	9	9	9	7	77.78	9	7	77.78
		jumlah paket Pemeliharaan sarana perkantoran	4	4	4	3	75	4	3	75
1 0 07 2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100
1 0 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	9	9	9	9	100	9	9	100
1 0 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM	5	9	5	7	140	5	7	140
1 0 08 2	Program penyusunan, pengendalian & evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja	NA	100	100	100	100	100	100	100
1 0 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5	5	5	5	100	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Jumlah dokumen usulan musrenbang yang terdokumentasi	38	14	38	38	100	38	38	100		
		Jumlah fasilitasi perencanaan dan penganggaran di UPT	13	8	13	13	100	13	13	100		
1	0 2	08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun sesuai aturan yang berlaku	13	13	13	13	13	100		
1	0 2	08 003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Puskesmas yang memiliki SIK sesuai standar	960	300	600	600	600	100		
1	0 2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	675	239	135	402	2.98	135	402	2.98
				Jumlah Puskesmas PONED yang aktif	225	113	25	59	236	25	59	236
				Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar	600	137	100	105	1.05	100	105	1.05
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia	56	28.82	56	68	121.43	56	68	121.43
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja			0.67	0.65	97	0.67	0.65	97
				Cakupan Pelayanan Bayi	>97	74.12	96	95.56	99.5	96	95.56	99.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	>97	72.696	96	94.63	98.57	96	94.63	98.57	
		Persentase Kasus pasung ditangani	100	0.6	100	0.6	100	100	0.6	100	
		Cakupan Ponkesdes sesuai standar		48	50	51.6	103.2	50	51.6	103.2	
1	016021	Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usila	-Jumlah Nakes yang terlatih Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	10	0	5 puskesmas	3.96	94.23	5 puskesmas	3.96	94.23496
			- Jumlah Tim Pembina UKS yang aktif	0	0	12	10		12	10	
			- Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	0	0	29	39.48		29	39.48	
1	016023	Pembinaan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	672	239	135	402	297.78	135	402	297.78
			Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar	600	137	100	105	105	100	105	105
1	016037	Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah	-Jumlah kemitraan dalam peningkatan pelayanan ANC berkualitas	6	1	6	1	16.66666667	6	1	16.66667
			Jumlah data kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra sekolah	7	7	7	14	233.33	7	14	233.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 16 038 2	Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	-Jumlah tenaga kesehatan terlatih CTU (Contraceptive Technology Update)	20	0	20	20	100	20	20	100
		Jumlah tenaga kesehatan terlatih APBK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan)	20	20	20	20	100	20	20	100
1 0 16 044 2	Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis	Cakupan Ponkesdes sesuai standar	80	49	0.02	0.021786	110	0.02	0.021786	110
		Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar				1.089325			1.089325	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 16 050 2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional	35.00	10 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	1	14 kab/kota	14 kab/kota	1
		Jumlah kelompok Asuhan mandiri yang dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional	30.00	-	10 kelompok	10 kelompok	1	10 kelompok	10 kelompok	1
1 0 16 051 2	Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Laboratorium sederhana di Puskesmas sesuai standar	400	186	50	35	70	50	35	70
1 0 16 052 2	Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Daerah terpencil dan tertinggal	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan kriteria terpencil	30	19	5	9.38	187.6	5	9.38	187.6
1 0 19 2	Program Promosi Kesh dan Pemberdayaan Masy	- Persentase rumah tangga sehat;	62	53	56	54.02	132.09	56	54.02	132.09
		- Prosentase Posyandu Puri;	74	71	70	73.97	66.27			
		- Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	49	43	45	46.39	0	56	54.02	132.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 19 001 2	Pengembangan media promosi dan Informasi Sadar hidup sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Program Promkes Yang Dihasilkan	9	9	9	9	100	9	9	100
1 0 19 013 2	Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)	Jumlah Posyandu PURI yang dibina			12,804	12423	97.024	12,804	12423	97.024
		Jumlah Desa Siaga Aktif yang dibina			302	273				
		-Jumlah UKBM yang dibina	Data Tidak Tersedia	433	198	457	230.88	198	457	230,88
1 0 20 2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Kurang Gizi	12	17.3	10.90	15.5	142.2018349	10.90	15.5	142.2018
		2. Pesentase Balita Stunting	25	26.1	26.20	26.7	101.9083969	26.20	26.7	101.9084
1 0 20 003 2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	-Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi	12	6	4	2	50	4	2	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		-Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)	1	0	1	1	100	1	1	100
		-Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Kadarzi	1	1	1	1	100	1	1	100
		-Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	4	2	1	2	200	1	2	200
1	0 20 004 2	Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi	4	2	4	2	50	4	2	50
1	0 21 2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	85	83.87	85	87,85 %		85	87,85 %	
		Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat	80	83.08	83	85,62 %		83	85,62 %	
1	0 21 05 2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	20,000	5,400	6,080	9908		6,080	9908	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 21 06 2	Penyehatan Lingkungan	Jumlah Forum Kota Sehat yg terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota	38	36	2	2		2	2	
1 0 21 08 2	Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg dibina	150	30	15	12		15	12	
		Jumlah rumah tangga yg dibina tentang pengelolaan limbah Rumah Tangga	1,500	250	250	250	80	250	250	80
1 0 21 09 2	Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory	Jumlah desa yg sudah dilakukan pemecuan	6,900	255	255	187	73.33	255	187	73.33
1 0 33 2	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit terakreditasi)	75	67	75	75	100	75	75	100
		Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	>65	92,72%	60	60	100	60	60	100
		Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	>80	1	80	89	11125	80	89	11125
1 0 33 008 2	Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS	Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur	1	35	1	55	137.5	1	55	137.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 33 019	Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan	Jumlah Bimbingan Teknis dalam Rangka Pengembangan Sistem Kegawatdaruratan Pelayanan Penunjang di RSUD dan RS Khusus	6	8	8	9	112.5	8	9	112.5
		Jumlah Sarkes Melaksanakan Uji Coba Sistem Rujukan	6	-	4	4	0	4	4	0
		Jumlah tenaga RS Terlatih Sistem Informasi Kegawatdaruratan	20	20	20	40	200	20	40	200
1 0 34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	- Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100	100
1 0 34 005	Penguatan Kualitas Program Kesehatan	Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan	12	12	9	11		9	11	
		Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan			75	50		75	50	
1 0 34 006	Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan	Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan	6	3	6	3	50	6	3	50
		Jumlah fasilitasi / monev / konsultasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan	36	15	36	29	80.56	36	29	80.56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 34 007 2	Kerjasama Program, Lintas Sektor dan Antar Daerah Dalam Bidang Kesehatan	Jumlah fasilitasi penyusunan PKS / kerjasama yang dilaksanakan	7	2	5	1	20	5	1	20
		Jumlah dokumen kerjasama antarprovinsi / kab / kota / BLN dll terdokumentasi	100	3	80	0	0	80	0	0
1 0 34 008 2	Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT	jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan	10	9	8	8	100	8	8	100
		jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK) UPT	-	1	1	8	8	1	8	8
		jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT	10	-	8	8	100	8	8	100
1 0 44 2	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	100	97	98	97	98.98	98	97	98.98
		Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat			71	75	105.63	71	75	105.63
		Persentase produk makanan yang memenuhi syarat			74	72	97.23	74	72	97.23
		Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat			66	61	92.42	66	61	92.42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 44 1 2	Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah paket obat buffer stock program yang diadakan	5	3	5	5	100	5	5	100
1 0 44 2 2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kab / Kota yang ketersediaan obatnya cukup sesuai kebutuhan	38	25	34	32	94.12	34	32	94.12
1 0 44 3 2	Pelayanan Kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian	55	25	35	21	60	35	21	60
1 0 44 4 2	Pembinaan Mutu penggunaan obat	Jumlah sarana kesehatan primer yang melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk 3 (tiga) penyakit indikator	432	202	336	55	16.37	336	55	16.36
1 0 44 5 2	Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu	Jumlah jenis tanaman obat asli Indonesia yang dibudidayakan di UPT untuk dimanfaatkan oleh masyarakat		-	1,300	0		1,300	0	
		Jumlah masyarakat Jatim memahami manfaat TOGA yang aman dan benar		-	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0
1 0 44 6 2	Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)	Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola narkotika dan psikotropika	3,479	2,783	3,015	1,753.29	58.15	3,015	1,753.29	58.15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 44 7 2	Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika	Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang di bina untuk memenuhi standar	60	40	60	58	96.67	60	58	96.67
1 0 44 8 2	Penguatan mutu dan keamanan makanan	Jumlah Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	10,000	4,900	8,000	4840		8,000	4840	
1 0 44 9 2	Pembinaan kualitas produk alat kesehatan	Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang di bina untuk dapat memenuhi standard	60	50	60	55.6	92.66666667	60	55.6	92.66667
1 0 44 10 2	Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium	Tersedianya buffer bahan kimia dan laboratorium	2	1	0.50	2	35.55	0.50	2	35.55
1 0 44 11 2	Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )	Terlaksananya rehab/peluasannya gudang Instalasi Farmasi Provinsi			100	100		100	100	
1 0 46 2	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	Output : Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)	SpA : 1 (277 dr SP.A)	409	363 dr.SpA	SpOG : 1 (356 dr.SpOG)	98.07	363 dr.SpA	SpOG : 1 (356 dr.SpOG)	#VALUE!
			SpOG		265 dr SP.A	SpA : 1 (290 dr SP.A)	109.43	265 dr SP.A	SpA : 1 (290 dr SP.A)	109.43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Dr : 24 (9.032 dr)	6,660	7.832 dr	Dr : 17 (3.970 dr)	50.69	7.832 dr	Dr : 17 (3.970 dr)	50.69
			Bdn : 57 (21.652 bidan)	22,113	19.652 bidan	Bdn : 46 (18.116 bidan)	92.61	19.652 bidan	Bdn : 46 (18.116 bidan)	92.61
			Pwt : 102 (38.699 perawat)	33,155	34.699 perawat	Pwt : 81 (33.054 perawat)	95.26	34.699 perawat	Pwt : 81 (33.054 perawat)	95.26
			Ntr : 7 (2.761 nutrisionis)	1,886	2.361 nutrisionis	Ntr : 5 (1.629nutrisionis)	69.00	2.361 nutrisionis	Ntr : 5 (1.629nutrisionis)	69.00
1 0 46 001 2	Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Dokumen perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan di Dinkes Prov. dan UPT Dinkes Prov.	14	3	6	5	83.33	6	5	83.33
1 0 46 002 2	Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim yang belum diselesaikan	-	25	15	15	333.3333333	15	15	333.3333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 0 46 003 2	Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)	Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010 dan Permenkes 56 tahun 2014)	17	9	13	13	100	13	13	100
1 0 46 004 2	Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Jumlah maskin yang dicover jamkesda	706,249	37,632	347,335			347,335		
		Jumlah Dokumen DHA Kabkota	19	-	15	15	100	15	15	100
4 0 49 9 2	Program Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan pengobatan TB	90	75	90	90.1	100.11	90	90.1	100.11
		Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi	90	20	20	20.06		20	20.06	
		Persentase KLB Pasca Bencana	95	-	10	45.62		10	45.62	
		Persentase RFT Rate	90	1	91	89.2	98.02	91	89.2	98.02
		Persentase ODHA dengan ARV	71	1	100	80	80	100	80	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT	100	100	95	100	105.26	95	100	105.26	
		Insiden rate DBD	39	1	<51	17.2	66.27	<51	17.2	66.27	
		Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase cakupan diare	70	65	85	16.88	24.11	85	16.88	24.11	
		Persentase cakupan pneumonia	30	0	45	47,7	106	45	47,7	106	
4 9	0 2	49 001	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita	Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang dilakukan	38	38	38	3	3	38	3
				Jumlah kelompok populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM	10	10	15	3	3	15	3
4 9	0 2	49 002	Pengendalian Surveillance Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan	38	38	38	45	118.42	38	45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan  -Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi -	38	38	38	44.5	117.1052632	38	44.5	117.1053		
		Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan	38	38	38	38	100	38	38	100		
		Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan	38	38	38	37.5	98.68421053	38	37.5	98.68421		
		Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan	38	38	38	37.5	98.68421053	38	37.5	98.68421		
		Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	1	117	1	140	146.25	1	140	146.25		
		Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 2x 24 Jam	38		38	100		38	100			
4 9	0 2	49 003	Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	<i>Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia yg dilakukan</i>	76	43	76	100	131.58	76	100	131.58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		Jumlah KPD kusta terbentuk	33	36	39	43	110.2564103	39	43	110.2564		
		Jumlah penderita kusta ditemukan	4,000	3,282	4300	2076	2076	4300	2076	2076		
4 9	0 2	49 004	Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)	Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang dilakukan	76	54	76	38	50	76	38	50
				Jumlah layanan rujukan TB MDR	5	11	13	10	76.92	13	10	76.92
				Jumlah laboratorium diagnosis TB yang bermutu	16	-	25	30	120	25	30	120
4 9	0 2	49 005	Pengendalian HIV/AIDS dan IMS	Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan	76	47	76	86	113.16	76	86	113.16
				Jumlah kegiatan sero survey	10	4	10	6	60	10	6	60
				Jumlah layanan CST yang aktif	40	47	55	96	174.55	55	96	174.55
				Jumlah layanan VCT yang aktif	100	353	109	940	8.62	109	940	8.62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 0 49 006 9 2	Pengendalian Penyakit Malaria	Juml fasilitasi P2 Malaria yg dilakukan	76	77	76	62	81.57894737	76	62	81.57895
		Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan	25	205	35	616	1760	35	616	1760
4 0 49 007 9 2	Pengendalian Penyakit PES	Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang dilakukan	50	3	60	39	65	60	39	65
		Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveillans rodent	18	18	15	18	30	15	18	30
		jumlah Puskesmas yang melakukan surveillans humans	5	10	5	5	33.33333333	5	5	33.33333
4 0 49 008 9 2	Pencegahan DBD (Demam Berdarah)	Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak	3	393	15.00	293	385.53	15.00	293	385.53
		Juml fasilitasi P2 DBD yang dilakukan	76	50	76	38		76	38	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 0 49 009 9 2	Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah yang dilakukan	76	16	76	34	44.74	76	34	44.7
		Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	5	4	10	71	710	10	71	710
4 0 49 010 9 2	Peningkatan Imunisasi	Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan	22 kab/kt 260 puskesmas	22	26	28	127.272727 3	26	28	127.2727
		Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA)	55	100	60	65	100	60	65	100
		Jumlah kegiatan Data Quality Self Assessment (DQS)	80 puskesmas dan 80 desa/kel	80	80	85	85	80	85	85
4 0 49 011 9 2	Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)	Jumlah fasilitasi penyakit menular langsung yang dilakukan			76	67		76	67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 0 49 012 9 2	Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)	Jumlah pasien filariasis yang ditemukan	4	2	4.00	385		4.00	385	
		Jumlah survey longitudinal DBD yang dilakukan	3	1	2	12	600	2	12	600
		Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan	3	1	2	3	150	2	3	150
		Jumlah uji efikasi insektisida yang dilakukan	4	1	4	1	25	4	1	25
		Jumlah gigitan hewan menular rabies yang ditangani	43	6	33	19	57.57575758	33	19	57.57576
4 0 49 013 9 2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana	-Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan	25	25	30	30	100	30	30	100
		jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan logistik bencana	35	35	35	35	100	35	35	100
		Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA)	35	35	35	35	100	35	35	100

(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018)

Berdasarkan Tabel hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. 13 program sudah dapat memenuhi target, yaitu meliputi:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
  - d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
  - e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - i. Program Upaya Kesehatan Perorangan
  - j. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
  - k. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan
  - l. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
  - m. Program Pengendalian Penyakit
2. Satu program masih harus ditingkatkan capaiannya yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Dari 59 kegiatan pada Tahun 2017, yang belum dapat memenuhi target sebanyak 5 kegiatan. Adapun kegiatan dimaksud adalah:
  - a. Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang
  - b. Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)
  - c. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
  - d. Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi
  - e. Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya beberapa target kinerja program dan kegiatan dapat disampaikan bahwa pada hakekatnya keberhasilan program/kegiatan kesehatan dipengaruhi merupakan sinergisitas stakeholder . Bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku serta pelayanan kesehatan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, sinergi antara kegiatan yang didanai APBD Provinsi , APBD kabupaten/Kota, dan, APBN.
3. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus.
4. Melakukan efisiensi belanja operasional.
5. Menentukan Fokus lokasi dalam intervensi program/kegiatan kesehatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	Angka Harapan Hidup			72,08	72,55	72,7				71,18		Data BPS
2	AKB (/1.000 Kelahiran Hidup)			24,63	24,48	24,34				22,12		Data BPS
3	AKI (1/100.000 Kelahiran Hidup)			91,97	91,38	90,86		91,92		97,10		Belum Terpenuhi
4	Prosentase Balita Gizi Buruk											
5	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan (%)							100				
6	Persentase stunting			26,2	25,2	25		26,7				Belum Terpenuhi
7	Persentase Rumah Sakit terakreditasi			70	75	80		74,5				Terpenuhi
8	Persentase RFT Rate Kusta			91	91,5	95		89,2				Belum Terpenuhi
9	Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV			80	86	90		80				Terpenuhi
10	Persentase keberhasilan pengobatan TB			91	91	95		90,1				Belum Terpenuhi

(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018)

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 170 disebutkan bahwa Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan, harus memperhatikan isu-isu yang berkembang, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, diantaranya adalah:

- Percepatan penurunan AKI dan AKB
- Meningkatkan Gizi Masyarakat dengan penurunan Stunting
- Mewujudkan Kemandirian Rumah Sakit : RS BLU
- Pemenuhan SDM Kesehatan
- Optimalisasi Promosi Kesehatan : PIS-PK dan Germas

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		PD Penanggungjawab
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN WAJIB</b>	-	-	-	82.500.000.000	-	130.865.000.000	-
<b>KESEHATAN</b>				82.500.000.000		130.865.000.000	
<b>[1.02.0101] DINAS KESEHATAN</b>				82.500.000.000		130.865.000.000	
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor</i>		100 %	5.000.000.000	100.00 %	7.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Kota Surabaya	100 %	5.000.000.000	100 %	7.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</i>		100 %	7.000.000.000	100.00 %	9.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Kota Surabaya	5 Paket/Unit	3.000.000.000	5 Paket/Unit	4.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Kota Surabaya	100 Paket/Unit	4.000.000.000	100 Paket/Unit	5.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi</i>		100 %	3.000.000.000	100.00 %	5.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Kota Surabaya	15 Kali	1.000.000.000	15 Kali	2.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Kota Surabaya	20 Orang	2.000.000.000	20 Orang	3.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Kota Surabaya	200 Orang		200 Orang		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</i>		100 %	1.500.000.000	100.00 %	3.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kota Surabaya	5 dokumen	700.000.000	5 dokumen	1.250.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Kota Surabaya	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	700.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Kota Surabaya	5 dokumen	200.000.000	5 dokumen	550.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Kota Surabaya	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	500.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar</i>		35 %	3.975.000.000	35.00 %	7.100.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Ponkesdes sesuai standar</i>		52 %		52.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan pelayanan kesehatan USILA</i>		58 %		58.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Prosentase Kasus Pasung ditangani</i>		97 %		97.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase Kab/Kota yang mempunyai 60 % Posyandu PURI</i>		97 %		97.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase Kab/Kota yang mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI</i>		84 %		84.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung</i>		42 %		42.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat</i>		84 %		84.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase Kab/Kota Yang menyelenggarakan program kesehatan kerja sesuai standar</i>		40 %		40.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja</i>		68 %		68.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Peserta KB Aktif</i>		70 %		70.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Pelayanan Bayi</i>		97 %		97.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>

	<i>Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes</i>		100 %		100.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Kab/Kota Yang menyelenggarakan program kesehatan olah raga sesuai standar</i>		40 %		40.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan	Kota Surabaya	100 %	500.000.000	100 %	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI	Kota Surabaya	16 kab/kota	1.800.000.000	16 kab/kota	3.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar	Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM sesuai standar	Kota Surabaya	31 Kab/Kota	250.000.000	31 Kab/Kota	600.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyehatan Sarana Air Minum	Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan sarana air minum sesuai standar	Kota Surabaya	75 %	350.000.000	75 %	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum	Persentase Kab/Kota melaksanakan program Kota Sehat sesuai standar	Kota Surabaya	95 %	200.000.000	95 %	300.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan TTU sesuai standar	Kota Surabaya	45 %		45 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyehatan Pangan	Persentase Kab/Kota melaksanakan pengawasan TPM sesuai standar	Kota Surabaya	85 %	350.000.000	85 %	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengamanan Limbah Cair dan Padat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan	Kota Surabaya	40 RS	175.000.000	40 RS	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya kesehatan kerja	Kota Surabaya	25 kab/kota	200.000.000	25 kab/kota	400.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah pembinaan kesehatan kerja terhadap nakes di kab/kota	Kota Surabaya	30 kab/kota		30 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah kerja	Kota Surabaya	300 orang		300 orang		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan kabupaten/kota mampu melakukan upaya kesehatan olah raga	Kota Surabaya	20 kab/kota	150.000.000	20 kab/kota	300.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah pembinaan kesehatan olah raga terhadap nakes di kab/kota	Kota Surabaya	20 kab/kota		20 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah nakes yang dilatih kesehatan olah raga	Kota Surabaya	300 orang		300 orang		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	<i>Persentase Balita Gizi Kurang</i>		10,10 %	2.312.500.000	10,10 %	5.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)		1 kali	1.012.500.000	1 kali	3.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum		4 kali		4 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi		12 kali		12 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Kadarzi	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang, Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pam ekasan,Pasuruan,Ponorogo,Pro bolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situ bondo,Sumenep,Trenggalek,Tu ban,Tulungagung	1 kali	500.000.000	1 kali	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang, Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pam ekasan,Pasuruan,Ponorogo,Pro bolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situ bondo,Sumenep,Trenggalek,Tu ban,Tulungagung	4 kali		4 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S).	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	80 %		80 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	4 indikator	800.000.000	4 indikator	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase Pengelolaan Admisnitasi Keuangan sesuai SKP		100 %	2.156.250.000	100.00 %	5.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	<i>Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar</i>		100 %		100.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Dinkes dan UPT yang melaksanakan budaya kerja</i>		100 %		100.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penguatan kualitas program kesehatan	Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan	Kota Surabaya	77 kali	1.056.250.000	77 kali	2.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah fasilitas BLUD UPT yang dilaksanakan	Kota Surabaya	10 kali		10 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan provinsi	Kota Surabaya	5 kali		5 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / kab/kota/BLN dll	Kota Surabaya	1 dokumen		1 dokumen		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan	Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan	Kota Surabaya	1 kali	800.000.000	1 kali	1.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan	Kota Surabaya	36 kali		36 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan	Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / kab/kota/BLN dll	Kota Surabaya	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT	Jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK) UPT	Kota Surabaya	13 dokumen	100.000.000	13 dokumen	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT	Kota Surabaya	13 kelompok		13 kelompok		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan	Kota Surabaya	13 dokumen		13 dokumen		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan</i>	<i>Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin</i>		100 %	2.900.000.000	100.00 %	6.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat</i>		75 %		75.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase produk makanan yang memenuhi syarat</i>		80 %		80.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	<i>Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat</i>		70 %		70.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi syarat</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang memenuhi syarat</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase produk makanan hasil sampling yang memenuhi syarat</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)	Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola Narkotika dan Psikotropika	Kota Surabaya	3.479 sarana kefarmasian	200.000.000	3479 sarana kefarmasian	400.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika	Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang dibina untuk memenuhi standar	Kota Surabaya	196 sarana	300.000.000	196 sarana	600.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium	Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan laboratorium yang diadakan	Kota Surabaya	5 paket	100.000.000	5 paket	250.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Upaya penyediaan dan pemerataan obat dan bahan medis habis pakai	Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup sesuai kebutuhan	Kota Surabaya	38 instalasi	100.000.000	38 instalasi	250.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah paket obat buffer program yang diadakan	Kota Surabaya	3 paket		3 paket		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan pelayanan kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian	Kota Surabaya	825 sarana	800.000.000	825 sarana	1.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan mutu penggunaan obat	Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator	Kota Surabaya	1.050 sarana	100.000.000	1050 sarana	250.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Upaya Pembinaan mutu dan keamanan makanan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi	Kota Surabaya	5.500 IRTP	100.000.000	5500 IRTP	250.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas produk alat kesehatan	Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi alat kesehatan yang dibina untuk dapat memenuhi standar	Kota Surabaya	65 sarana	1.200.000.000	65 sarana	2.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan</i>	<i>Persentase institusi yang menyusun dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar</i>		77 %	3.200.000.000	77.00 %	3.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi</i>		90 %		90.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Penerbitan Angka Kredit</i>		95 %		95.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Institusi yang mengajukan Pemilihan tenaga Kesehatan teladan</i>		95 %		95.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Institusi yang divalidasi data SDMK sesuai standar</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya</i>		87 %		87.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih	Kota Surabaya	27 nakes	1.400.000.000	27 nakes	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Penerbitan Angka Kredit (PAK)	Kota Surabaya	1.800 PAK		1800 PAK		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	Jumlah institusi yang dibina dalam penyusunan Data SDMK	Kota Surabaya	44 institusi	800.000.000	44 institusi	800.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disusun	Kota Surabaya	50 dokumen		50 dokumen		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Kota Surabaya	50 sertifikat		50 sertifikat		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah sakit dan jaringannya)	Jumlah RS kelas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya	Kota Surabaya	12 RS	1.000.000.000	12 RS	1.200.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Kota Surabaya	4.500 Sertifikat		4500 Sertifikat		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pengendalian Penyakit</i>	<i>persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus</i>		20 %	8.000.000.000	20.00 %	14.065.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>persentase kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</i>		93 %		93.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 48 Jam</i>		95 %		95.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah</i>		100 %		100.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child immunization)</i>		100 %		100.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase penderita suspek pes yang dilakukan penyelidikan epidemiologi</i>		5 %		5.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase kab/kota dengan Incidence Rate DBD &lt; 49/1000.000 penduduk</i>		95 %		95.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Hipertensi</i>		0 %		0.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Penyakit Gigi dan Mulut</i>		90 %		90.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap</i>		51 %		51.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase kab/kota eliminasi malaria</i>		95 %		95.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	<i>Persentase kab/kota yang melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik 100%</i>		50 %		50.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Persentase kab/kota yang melaksanakan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)</i>		0,50 %		0.50 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Pengendalian Surveillance Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD31 yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jeber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan	800.000.000	38 kegiatan	1.525.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Differi yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jejember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jejember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	100 %		100 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Malaria	jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2 malaria	Kota Surabaya	38 kab/kota	150.000.000	38 kab/kota	180.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan	Kota Surabaya	50 kasus		50 kasus		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit PES	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Pes	Pasuruan	1 kab/kota	150.000.000	1 kab/kota	295.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent	Pasuruan	15 dusun		15 dusun		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans	Pasuruan	5 puskesmas		5 puskesmas		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis pemberantasan penyakit menular dan wabah	Blitar,Gresik,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Pacitan,Ponorogo,Sampang,Trenggalek,Tulungagung	38 kab/kota	250.000.000	38 kab/kota	490.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah jenis penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	Blitar,Gresik,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Pacitan,Ponorogo,Sampang,Trenggalek,Tulungagung	11 jenis penyakit		11 jenis penyakit		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Imunisasi	Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 kegiatan	1.200.000.000	38 kegiatan	2.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA) yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	70 Desa/kel		70 Desa/kel		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah kegiatan Data Quality Self Assessment (DQS) yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang, Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pam ekasan,Pasuruan,Ponorogo,Pro bolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situ bondo,Sumenep,Trenggalek,Tu ban,Tulungagung	300 puskesmas		300 puskesmas		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang, Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pam ekasan,Pasuruan,Ponorogo,Pro bolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situ bondo,Sumenep,Trenggalek,Tu ban,Tulungagung	38 kegiatan		38 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin managemen (EVM) yang dilakukan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Je mber,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang, Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pam ekasan,Pasuruan,Ponorogo,Pro bolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situ bondo,Sumenep,Trenggalek,Tu ban,Tulungagung	38 kab/kota		38 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

	Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	100 kasus		100 kasus		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	80 Desa/kel		80 Desa/kel		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)	Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang difasilitasi	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	20 kasus	300.000.000	20 kasus	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)	Jumlah Puskesmas yang melakukan pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jejember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	38 puskesmas	300.000.000	38 puskesmas	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Fasilitasi Surveilans aktif KKM terintegrasi	Bangkalan,Banyuwangi,Blitar,Bojonegoro,Bondowoso,Gresik,Jejember,Jombang,Kediri,Kota Batu,Kota Blitar,Kota Kediri,Kota Madiun,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Probolinggo,Kota Surabaya,Lamongan,Lumajang,Madiun,Magetan,Malang,Mojokerto,Nganjuk,Ngawi,Pacitan,Pamekasan,Pasuruan,Ponorogo,Probolinggo,Sampang,Sidoarjo,Situbondo,Sumenep,Trenggalek,Tuban,Tulungagung	40 kali		40 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP)	Gresik,Jombang,Kediri,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Surabaya,Lamongan,Malang,Mojokerto,Sidoarjo	15 kab/kota	300.000.000	15 kab/kota	450.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 ISPA	Gresik,Jombang,Kediri,Kota Malang,Kota Mojokerto,Kota Pasuruan,Kota Surabaya,Lamongan,Malang,Mojokerto,Sidoarjo	16 kab/kota		16 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Vektor	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan Vektor		17 kab/kota	300.000.000	17 kab/kota	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah asistensi pengendalian vektor yang dilakukan		10 kali		10 kali		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular	persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu (PANDU)	Kota Surabaya	40 %	1.000.000.000	40 %	2.200.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	Kota Surabaya	40 %		40 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim	Kota Surabaya	40 %		40 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	Kota Surabaya	40 %		40 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak	Kota Surabaya	10 %		10 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan penanganan pasien pasung di kab/kota	Kota Surabaya	38 Kali	900.000.000	38 Kali	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan program kesehatan jiwa	Kota Surabaya	40 orang		40 orang		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Masalah NAPZA	Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan NAPZA	Kota Surabaya	15 kali	250.000.000	15 kali	575.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan masalah NAPZA	Kota Surabaya	30 orang		30 orang		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut	Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan gigi dan mulut	Kota Surabaya	15 kali	200.000.000	15 kali	350.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Hipertensi	Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining hipertensi	Kota Surabaya	5 %	500.000.000	5 %	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit Diabetes	Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining diabetes mellitus	Kota Surabaya	5 %	500.000.000	5 %	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengendalian penyakit kanker	Persentase perempuan usia 30-59 yang dideteksi dini kanker leher rahim	Kota Surabaya	2 %	500.000.000	2 %	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Pencegahan DBD (Demam Berdarah)	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 DBD	Kota Surabaya	38 kab/kota	400.000.000	38 kab/kota	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pelayanan Kesehatan Primer</i>	<i>Persentase Puskesmas memenuhi standar</i>		70 %	2.700.000.000	70.00 %	6.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Ponkesdes sesuai standar</i>		80 %		80.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional</i>		45 %		45.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Kota Surabaya	672 puskesmas	1.000.000.000	672 puskesmas	2.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam mendukung akreditasi Puskesmas	Kota Surabaya	38 kab/kota		38 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam mendukung Puskesmas mampu PONED	Kota Surabaya	10 kab/kota		10 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam mendukung pelayanan gawat darurat di Puskesmas	Kota Surabaya	10 kab/kota		10 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Surabaya	2.570 ponkesdes	300.000.000	2570 ponkesdes	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di daerah terpencil	Jumlah Pembinaan ke kab yang mempunyai daerah terpencil	Kota Surabaya	4 kali	100.000.000	4 kali	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penguatan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional	Kota Surabaya	35 kab/kota	1.300.000.000	35 kab/kota	2.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional	Kota Surabaya	20 kelompok		20 kelompok		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pengembangan Kesehatan Tradisional</i>	<i>Persentase pemanfaatan fasilitas kesehatan tradisional</i>		100 %	2.500.000.000	100.00 %	4.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan berbasis Keterampilan	Jumlah pemanfaatan jamu yang berkualitas di pelayanan	Kota Surabaya	2.000 fasilitas	200.000.000	2000 fasilitas	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar	Kota Surabaya	8.000 masyarakat	200.000.000	8000 masyarakat	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kota Surabaya	1 paket	1.700.000.000	1 paket	2.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Upaya Penguatan Mutu TOI	Jumlah tanaman obat yang bermutu / berkualitas	Kota Surabaya	40 jenis	200.000.000	40 jenis	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penelitian obat tradisional yang berkualitas	Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat obat	Kota Surabaya	4 hasil penelitian	200.000.000	4 hasil penelitian	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	<i>Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang berfungsi sesuai standar</i>		100 %	2.200.000.000	100.00 %	3.700.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS	Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan movev dalam hal peningkatan kualitas pelayanan	Kota Surabaya	50 RS	600.000.000	50 RS	900.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan	Jumlah RS Rujukan Regional yang mendapatkan pembinaan dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan regionalisasi	Kota Surabaya	8 RS	800.000.000	8 RS	1.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sesuai standar	Kota Surabaya	11 kab/kota		11 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang	Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang	Kota Surabaya	4 kali	300.000.000	4 kali	500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dalam pelayanan darah	Kota Surabaya	8 kab/kota		8 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pelayanan dan penanggulangan masalah krisis kesehatan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait penanggulangan bencana	Kota Surabaya	38 kab/kota	500.000.000	38 kab/kota	800.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update	Kota Surabaya	20 dokumen		20 dokumen		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA)	Kota Surabaya	40 kejadian		40 kejadian		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
<i>Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanannya dibiayai oleh Provinsi</i>		262.524 Orang	30.850.000.000	262524.00 Orang	40.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam mendukung jaminan kesehatan masyarakat dalam program jkn	Kota Surabaya	38 kab/kota	30.850.000.000	38 kab/kota	40.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan

<i>Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta</i>	<i>Persentase kab/kota yang RFT rate nya mencapai target</i>		80 %	1.000.000.000	80.00 %	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta	Bangkalan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Tuban	38 kab/kota	1.000.000.000	38 kab/kota	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang dilakukan pelacakan	Bangkalan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Tuban	80 %		80 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak serumah	Bangkalan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Tuban	70 %		70 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
<i>Program Pencegahan dan Pengendalian HIV</i>	<i>Persentase kab/kota yang &gt; 70% perkiraan populasi kunci dan populasi khusus telah melakukan tes HIV</i>		76 %	1.000.000.000	76.00 %	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Pengendalian HIV/AIDS	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan IMS	Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, Tulungagung	38 kab/kota	1.000.000.000	38 kab/kota	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
<i>Program Pencegahan dan Pengendalian TB</i>	<i>persentase Kab/Kota yg mencapai target Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB &gt; 85%</i>		100 %	1.000.000.000	100.00 %	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2TB	Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Sampang	16 kab/kota	1.000.000.000	16 kab/kota	2.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	Jumlah layanan RS TB Resisten Obat	Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Sampang	20 layanan		20 layanan		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
<i>Program Upaya Kesehatan Keluarga</i>	<i>Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut</i>		58 %	2.206.250.000	58.00 %	6.000.000.000	<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)</i>		99 %		99.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>
	<i>Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja</i>		68 %		68.00 %		<i>(1.02.01.01) Dinas Kesehatan</i>

	<i>Cakupan Peserta KB Aktif</i>		70 %		70.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	<i>Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes</i>		97 %		97.00 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan kesehatan remaja	Banyuwangi,Gresik,Jember,Jombang,Kota Surabaya,Malang,Mojokerto,Pasuruan,Ponorogo,Sidoarjo	9 kab/kota	600.000.000	9 kab/kota	1.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan Puskesmas Santun Lansia	Banyuwangi,Gresik,Jember,Jombang,Kota Surabaya,Malang,Mojokerto,Pasuruan,Ponorogo,Sidoarjo	10 kab/kota		10 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah	Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan kesehatan ibu		9 kab/kota	1.156.250.000	9 kab/kota	3.500.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota mendukung persalinan di fasilitas		38 kab/kota		38 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir		9 kab/kota		9 kab/kota		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)		90 %		90 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (PF)		98 %		98 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN lengkap)		99 %		99 %		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Jumlah Puskesmas terorientasi PKRT		8 puskesmas	450.000.000	8 puskesmas	1.000.000.000	(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA		25 puskesmas		25 puskesmas		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
	Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan PPIA		2 kegiatan		2 kegiatan		(1.02.01.01) Dinas Kesehatan
				<b>82.500.000.000</b>		<b>130.865.000.000</b>	

(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018)

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan di daerah terpencil bahkan Rumah sakit Terapung.

## **BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 mempunyai tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas yang akan dicapai melalui 5 Prioritas Nasional (PN) dan 24 Program Prioritas (PP). Adapun Prioritas Nasional dalam RKP 2019 adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman,
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif,
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air,
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Bidang Kesehatan merupakan prioritas nasional pertama (PN-1) dimana isu strategis yang mengemuka pada PN-1 adalah :

1. Lambatnya penurunan angka kemiskinan,
2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
3. Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar,
4. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antar kelompok pendapatan.

Program prioritas (PP) dari PN-1 adalah :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan,
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat,
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak,

5. Peningkatan tata kelola layanan dasar.

Program prioritas (PP) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dilaksanakan dalam 5 Kegiatan Prioritas (KP), yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan penurunan stunting
3. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dan pengendalian penyakit
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
5. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan

Berdasarkan arah kebijakan nasional tahun 2019 dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 juga memperhatikan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas di bidang kesehatan yang tercantum dalam RKP 2019.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Bayi, dengan indikator:
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI),
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB),

- c. Persentase Stunting.
2. Meningkatnya Persentase Akreditasi Rumah Sakit, dengan indikator:
  - a. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi.
3. Menurunnya Angka Kesakitan, dengan indikator:
  - a. Persentase RFT Rate Kusta,
  - b. Persentase Penderita HIV yang Mendapatkan ARV,
  - c. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Jawa Timur					
Sasaran 1: Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Bayi					
Indikator Sasaran:					
1. Angka Kematian Ibu (AKI)	97,29	97,19	91,97	91,38	90,86
2. Angka Kematian Bayi (AKB)	26,48	25,61	24,63	24,48	24,34
3. Persentase Stunting	28,2	27,2	26,2	25,2	25
Sasaran 2: Meningkatnya Persentase Akreditasi Rumah Sakit					
Indikator Sasaran:					
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	65%	70%	70%	75%	80%
Sasaran 3: Menurunnya Angka Kesakitan					
Indikator Sasaran:					
1. Persentase RFT Rate Kusta	90%	91%	91%	91,5%	95%
2. Persentase Penderita HIV yang mendapatkan ARV	77%	78%	80%	86%	90%
3. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	91%	91%	91%	91%	95%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 9 Kegiatan yaitu :
  - a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat,
  - b) Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat),
  - c) Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar,
  - d) Penyehatan Sarana Air Minum,
  - e) Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum,
  - f) Penyehatan Pangan,
  - g) Pengamanan Limbah Cair dan Padat,
  - h) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja,
  - i) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga.
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
  - a) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya,
  - b) Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi,
  - c) Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi.
3. Program Pelayanan Kesehatan Primer, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
  - a) Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat,
  - b) Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes),
  - c) Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di daerah terpencil,
  - d) Penguatan pelayanan kesehatan tradisional.
4. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional, terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :
  - a) Pelayanan Kesehatan berbasis Keterampilan,
  - b) Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar,
  - c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional,
  - d) Pemeliharaan tanaman obat,
  - e) Upaya Penguatan Mutu TOI,

- f) Diversifikasi manfaat tanaman obat,
  - g) Penelitian obat tradisional yang berkualitas.
5. Program Upaya Kesehatan Keluarga, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
- a) Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut,
  - b) Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah,
  - c) Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.
6. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
- a) Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS,
  - b) Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan,
  - c) Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang,
  - d) Pembinaan Pelayanan dan penanggulangan masalah krisis kesehatan.
7. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
- a) Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
8. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
- a) Pengembangan dan fasilitasi Program Kesehatan,
  - b) Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan,
  - c) Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan,
  - d) Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT.
9. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan, terdiri dari 9 Kegiatan yaitu :
- a) Upaya penyediaan dan pemerataan obat dan bahan medis habis pakai,
  - b) Pembinaan pelayanan kefarmasian,
  - c) Pembinaan mutu penggunaan obat,
  - d) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza),
  - e) Upaya Pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika,
  - f) Upaya Pembinaan mutu dan keamanan makanan,
  - g) Peningkatan kualitas produk alat kesehatan,

- h) Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium,
  - i) Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi (DAK).
10. Program Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :
- a) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan,
  - b) Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah sakit dan jaringannya),
  - c) Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan.
11. Program Pengendalian Penyakit, terdiri dari 19 Kegiatan yaitu :
- a) Pengendalian Surveillance Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB,
  - b) Pengendalian Penyakit Malaria,
  - c) Pengendalian Penyakit PES,
  - d) Pencegahan DBD (Demam Berdarah),
  - e) Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah,
  - f) Penyelenggaraan Imunisasi,
  - g) Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM),
  - h) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML),
  - i) Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2),
  - j) Pengendalian Vektor,
  - k) Pengendalian Penyakit Mata,
  - l) Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
  - m) Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa,
  - n) Pengendalian Masalah NAPZA,
  - o) Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut,
  - p) Pengendalian Penyakit Hipertensi,
  - q) Pengendalian Penyakit Diabetes,
  - r) Pengendalian penyakit Kanker,
  - s) Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok).
12. Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
- a) Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia.
13. Program Pencegahan dan Pengendalian HIV, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
- a) Pengendalian HIV/AIDS.

14. Program Pencegahan dan Pengendalian TB, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - a) Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis).
15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :
  - a) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
  - a) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana,
  - b) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana,
  - c) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana,
  - d) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana.
17. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
  - a) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,
  - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
18. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD, terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan,
  - b) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran,
  - c) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,
  - d) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan.

## **BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi ke 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan khususnya mendukung capaian pada Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

### **4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi**

Prioritas pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah: Penurunan AKI dan AKB, Penurunan Stunting dan Penanganan dan Pengendalian Penyakit (kegiatan promotif dan preventif), yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, RKP 2019 dan capaian program atau kegiatan. Adapun Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel 4.1.

### **4.2 Prioritas Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Penurunan AKI dan AKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut 58 %</li> <li>- Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap) 99%</li> <li>- Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap) 68%</li> <li>- Cakupan Peserta KB Aktif 70%</li> <li>- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes 97%</li> </ul>	Provinsi Jawa Timur	10299	<b>Program Upaya Kesehatan Keluarga</b>	2.206.250.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan kesehatan remaja 9 kab kota</li> <li>- Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan Puskesmas Santun Lansia 10 kab/kota</li> </ul>	Jember, Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Jombang, Kab. Pasuruan, Gresik, Banyuwangi, Kab. Malang, Ponorogo	10299001	Kegiatan Pembinaan pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut	600.000.000	
	- Jumlah	Jember,	10299002	Kegiatan Pembinaan kualitas	1.156.250.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	kabupaten/kota mendukung pelayanan kesehatan ibu 9 kab/kota - Jumlah kabupaten/kota mendukung persalinan di fasilitas 38 kab/kota - Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir 9 kab/kota - persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4) 90% - persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (PF) 98% - persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN lengkap) 99%	Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Jombang, Kab. Pasuruan, Gresik, Banyuwangi		pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah		
	- Jumlah Puskesmas	Jember, Kab.	10299003	Kegiatan pengembangan	450.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	terorientasi PKRT 8 puskesmas - Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA 25 puskesmas - Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan PPIA	Pasuruan, Kota Batu, Tuban		mutu pelayanan kesehatan reproduksi		
	- Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang berfungsi sesuai standar sebanyak 100%			<b>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	2.200.000.000	
	- Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan monev dalam hal peningkatan kualitas pelayanan sejumlah 8 RS	RS Paru Surabaya; RSK Paru Manguharjo; RSK Paru Dungus; RSU Mohamad Nur Pamekasan; RSUD Kertosono; RSUD Kota Malang; RSUD Asem Bagus;	10264001	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS	600.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
		RSUD Besuki; RSUD Pasirian; RSUD Ploso Jombang; RSUD Umar Mas'ud				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah RS Rujukan Regional yang mendapatkan pembinaan dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan regionalisasi sebanyak 8 RS</li> <li>- Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sesuai standar sebanyak 11 kab/kota</li> </ul>	Jember, Madiun, Surabaya, Gresik, Jombang	10264002	Kegiatan Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan	800.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang sebanyak 4 kali</li> <li>- Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan</li> </ul>	Ponorogo, Magetan, Pasuruan, Bondowoso, Ngawi	10264003	Kegiatan Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang	300.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	kerjasama dalam pelayanan darah sebanyak 8 kab/kota					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait penanggulangan bencana sebanyak 38 kab/kota</li> <li>- Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update sebanyak 20 dokumen</li> <li>- Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA) sebanyak 40 kejadian</li> </ul>	Kejadian bencana di 38 Kab/Kota	10264004	Kegiatan Pembinaan Pelayanan dan penanggulangan masalah krisis kesehatan	500.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanannya Kesehatan dibiayai oleh Provinsi sebanyak 262.524 orang</li> </ul>	Masyarakat miskin di 38 Kab/Kota dengan 24 RS sebagai pemberi pelayanan	10265	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
		kesehatan				
Penurunan Stunting	- Persentase Balita Gizi Kurang sebanyak 10,10%	Provinsi Jawa Timur	10220	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	2.312.500.000	
	- Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG) sebanyak 1 kali - Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum sebanyak 4 kali - Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi sebanyak 12 kali	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Malang, Nganjuk, Trenggalek, Lamongan	10220003	Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	1.012.500.000	
	- Jumlah survey dalam rangka pemetaan	Bangkalan, Sampang,	10220004	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Untuk	500.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	<p>situasi Kadarzi sebanyak 1 kali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)</li> <li>- Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) sebanyak 80%</li> </ul>	<p>Pamekasan, Sumenep, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Malang, Nganjuk, Trenggalek, Lamongan</p>		<p>pencapaian keluarga sadar gizi</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi sebanyak 4</li> </ul>		10220011	<p>Kegiatan Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi</p>	800.000.000	
<p>Penanganan dan Pengendalian Penyakit (Kegiatan Promotif Preventif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus sebanyak 20%</li> <li>- persentase kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 93%</li> </ul>		10249	<p><b>Program Pengendalian Penyakit</b></p>	8.000.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 48 Jam sebanyak 95%</li> <li>- Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebanyak 100%</li> <li>- Persentase Kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child immunization) sebanyak 100%</li> <li>- Persentase penderita suspek pes yang dilakukan penyelidikan epidemiologi sebanyak 5%</li> <li>- Persentase kab/kota dengan Incidence Rate DBD &lt; 49/1000.000</li> </ul>					

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	<p>penduduk sebanyak 95%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Hipertensi sebanyak 0%</li> <li>- persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Penyakit Gigi dan Mulut sebanyak 90%</li> <li>- Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 51%</li> <li>- Persentase kab/kota eliminasi malaria sebanyak 95%</li> <li>- Persentase kab/kota yang melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik 100% sebanyak 50%</li> <li>- Persentase kab/kota yang melaksanakan</li> </ul>					

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) sebanyak 0,50%					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans</li> </ul>	38 kab/kota	10249002	KegiatanPengendalian Surveillance Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB	800.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	<p>Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi sebanyak 100%</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2 malaria sebanyak 38 kab/kota</li> <li>- Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan sebanyak 50 kasus</li> </ul>	Trenggalek, Sumenep, Pacitan, Blitar, Pamekasan, Ponorogo	10249006	KegiatanPengendalian Penyakit Malaria	150.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 PES sebanyak 1 kab/kota</li> <li>- Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent sebanyak 15 dusun</li> <li>- Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans</li> </ul>	Pasuruan	10249007	KegiatanPengendalian Penyakit PES	150.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	sebanyak 5 puskesmas					
	- Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendaotkan skrining diabetes mellitus sebanyak 5%	Trenggalek, Kota Blitar, Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pacitan	10249025	Kegiatan Pencegahan DBD (Demam Berdarah)	500.000.000	
	- jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis pemberantasan penyakit menular dan wabah sebanyak 38 kab/kota - Jumlah jenis penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi sebanyak 11 jenis penyakit	Sampang, Gresik, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, Surabaya, Kota Probolinggo, Blitar	10249009	Kegiatan Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	1.200.000.000	
	- Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan - Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA)	38 kab/kota	10249010	Kegiatan Penyelenggaraan Imunisasi	1.200.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	<p>yang dilakukan sebanyak 70 desa/kel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan Data Quality Self Assessment (DQS) yang dilakukan sebanyak 300 puskesmas</li> <li>- Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin managemen (EVM) yang dilakukan sebanyak 38 kegiatan</li> <li>- Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin managemen (EVM) yang dilakukan sebanyak 38 kab/kota</li> <li>- Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan sebanyak 100 kasus</li> <li>- Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI sebanyak 80 desa/kel</li> </ul>					
	- Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang	38 kab/kota	10249012	Kegiatan Pemberantasan penyakit bersumber	300.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	difasilitasi sebanyak 20 kasus			binatang (P2B2)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Puskesmas yang melakukan pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH sebanyak 38 puskesmas</li> <li>- Jumlah Fasilitas Surveilans aktif KKM terintegrasi sebanyak 40 kali</li> </ul>	38 kab/kota	10249014	Kegiatan Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)	300.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP) sebanyak 15 kab/kota</li> <li>- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 ISPA sebanyak 16 kab/kota</li> </ul>	Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Jombang, Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang	10249015	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)	300.000.000	
	- Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan Vektor sebanyak 17 kab/kota	38 kab/kota	10249016	Kegiatan Pengendalian Vektor	300.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	- Jumlah asistensi pengendalian vektor yang dilakukan sebanyak 10 kali					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular terpadu (PANDU) dengan target 40%</li> <li>- persentase desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dengan target 40%</li> <li>- persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kankerleher rahim dengan target 40%</li> <li>- persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah dengan target 40%</li> <li>- persentase puskesmas</li> </ul>	<p>Jombang, Lumajang, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Kota Probolinggo, Tu lungagung, Tuban, Batu, Ponorogo, Sampang, Kota Madiun, Jember, Banyuwangi, Kota Malang, Malang, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Kota Blitar, Blitar, Situbondo, Bangkalan</p>	10249018	Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.000.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak dengan target 10%					
	- Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendaotkan skrining hipertensi dengan target 5%	Kota Malang, Gresik, Sampang, Pamekasan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Kota Blitar, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Batu, Madiun, Sumenep, Bangkalan	10249022	KegiatanPengendalian Penyakit Hipertensi	500.000.000	
	- Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining diabetes mellitus dengan target 5%	Trenggalek, Sumenep, Probolinggo, Kota Blitar, Ngawi, Kediri, Kota Kediri, Nganjuk,	10249023	KegiatanPengendalian Penyakit Diabetes	500.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
		Pasuruan, Ponorogo, Kota Probolinggo, Magetan, Sampang, Pamekasan				
	- Persentase perempuan usia 30-59 yang dideteksi dini kanker leher rahim dengan target 2%	Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Magetan, Jombang, Kediri, Batu, Bojonegoro, Jember, Jombang, Lumajang, Malang, Madiun, Nganjuk, Kota Probolinggo, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Lamongan	10249024	<b>Pengendalian penyakit kanker</b>	500.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	- Persentase kab/kota yang RFT rate nya mencapai target 80%		10266	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta</b>	1.000.000.000	
	- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta sebanyak 38 Kab/Kota - Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang dilakukan pelacakan dengan target 80% - Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak serumah dengan target 70%	Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Jember, Lumajang, Pasuruan, Tuban, Probolinggo	10266001	Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	1.000.000.000	
	- Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan populasi kunci dan populasi khusus telah melakukan tes HIV 76%		10267	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian HIV</b>	1.000.000.000	
	- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis	Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi,	10267001	Kegiatan Kegiatan Pengendalian HIV/AIDS	1.000.000.000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
	P2 HIV/AIDS dan IMS sebanyak 38 kab/kota	Jember, Malang, Kota Malang, Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Probolinggo				
	- persentase Kab/Kota yg mencapai target Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB > 85% dengan target 100%		10268	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian TB</b>	1.000.000.000	
	- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2TB sebanyak 16 kab/kota - Jumlah layanan RS TB Resisten Obat sebanyak 20 layanan	Kota Batu, Nganjuk, Pacitan, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Sampang, Kota Probolinggo, Ngawi, Malang	10268001	Kegiatan Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)	1.000.000.000	

### **4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

## BAB 5 PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat; yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Renja ini, beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Dalam rangka *universal health coverage* dimungkinkan pembiayaan bagi masyarakat miskin di luar pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,
2. Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, keberadaan Ponkesdes masih diperlukan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yg menjamin keberlanjutan Ponkesdes beserta pembiayaannya
3. Penyediaan anggaran bagi janji-janji politik pemimpin daerah yang baru yang harus diterjemahkan dalam program teknis sesuai peraturan perundangan.